

**PENERAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

(Studi di Kota Malang)

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Disusun oleh:

**ICHSAN PANJI KARUNIA, S.H.**

NIM. 156010200111035

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017



## RINGKASAN

ICHSAN PANJI KARUNIA, S.H., Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni, 2017, PENERAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Dosen Pembimbing Utama: Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum; Pembimbing Kedua: Siti Noer Endah, S.H., M.Kn.

Honorarium merupakan hasil dari jasa yang diterima oleh seorang notaris dan merupakan haknya. Honorarium tersebut telah diatur didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun tidak mengatur secara spesifik mengenai tarif minimal untuk setiap akta yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut menyebabkan bagi para klien untuk membandingkan tarif dari para notaris di Kota Malang. Hal ini berkaitan dengan kode etik notaris yang telah diatur oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia mengenai notaris dilarang menetapkan tarif yang lebih rendah. Tentunya tindakan notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan aturan kode etik organisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian sumber data merupakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya untuk menganalisis permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif honorarium di Kota Malang ada perbedaan dan tidak seragam hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan organisasi Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya untuk standarisasi minimal tarif honorarium notaris di Kota Malang. Sering kali notaris dihadapkan dengan klien yang selalu membandingkan tarif dengan notaris lain. Faktor yang menyebabkan notaris menurunkan tarif antara lain kondisi sosial dan ekonomi klien, sanksi yang kurang memaksa dan memberikan efek jera sehingga notaris dapat mengesampingkan itu demi mendapatkan klien dan rendahnya moral serta kualitas seorang notaris tersebut. Selanjutnya notaris yang melanggar ketentuan dari Kode Etik notaris dijatuhi sanksi awal dengan teguran yang sifatnya ada pembinaan terhadap notaris tersebut. Namun penegakan sanksi dalam kode etik di Kota Malang masih kurang memaksa dan kurang tegas dalam penegakannya serta pengawasan dalam pelaksanaan kode etik kurang baik.

Kata kunci : Notaris, Honorarium, Sanksi Kode Etik.

## SUMMARY

ICHSAN PANJI KARUNIA, S.H., Master Program of Notary, Faculty of Law, Brawijaya University, June 2017, NOTE OF HONORARIUM NOTARIS UNDER THE SUBSECTION 36 LAW CONSTITUTION 30 YEAR 2004 REGARDING NOTARIS, Major Supervisor: Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum; Second Advisor: Siti Noer Endah, S.H., M.Kn.

Honorarium is the result of services received by a notary and is his right. The honorarium has been regulated in Subsection 36 of Law Constitution Number 30 Year 2004 About a notary's office. However, it does not specify the minimum rate for each deed made by a notary. This causes for clients to compare rates from notaries in Malang. This relates to a notary code of ethics which has been regulated by the Indonesian Notary Bond Organization concerning a notary is prohibited to set a lower rate. Of course, notary actions that violate the provisions can be given sanctions in accordance with the provisions of the rules of ethics of the organization.

The research method used in this thesis research is empirical law research with sociological juridical approach method. Then the data source is the primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and further documentation to analyze the legal issues.

Based on research results, it can be concluded that the application of the fee rates in Malang there are differences and not uniform it is due to lack of agreement Indonesian Notary Association organization Malang Regional Committee for standardization minimal honorarium rates notary in Malang. Often a notary is confronted with a client who always compares the rates with other notaries. Factors that caused it to lower fare notary among other social and economic conditions of the client, sanctions that are less coercive and deterrent effect so that a notary can override it to get clients and the low morale and the quality of a notary. Furthermore, a Notary who violates the provisions of the Notary's Code of Conduct shall be subject to initial sanction with a reprimand that is in nature guarded by the notary. But the enforcement of sanctions in the code of ethics in the city of Malang is still less forceful and less assertive in its enforcement and supervision in the implementation of code of ethics less good.

Keywords: Notary, Honorarium, Sanction Code of Conduct.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan anugerah-Nya maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Adapun judul Tesis ini adalah **“PENERAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis menghadapi berbagai kendala dalam menemukan data maupun informasi yang dapat mempertajam analisis penulis terhadap permasalahan tersebut. Namun demikian atas petunjuk, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing untuk senantiasa bersemangat menyelesaikan penelitian pada akhirnya naskah Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari pula bahwa terselesaikannya Tesis ini adalah atas bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

4. Bapak Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan keteladanan membimbing penulis selama penyusunan Tesis ini;
5. Ibu Siti Noer Endah, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran, kedisiplinan, dan ditengah kesibukan beliau telah bersedia membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya;
7. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
9. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
10. Bapak dan Ibu Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Kota/Kabupaten Malang;
11. Bapak dan Ibu Majelis Pengawas Daerah Pengurus Daerah Kota/Kabupaten Malang;
12. Bapak dan Ibu Notaris Kota Malang yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi responden dalam berbagi informasi kepada penulis;
13. Kepada kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
14. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2015 Kelas B Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

15. Teman, sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat bagi penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

16. Semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

*Malang, 08 Juni 2017*

Penulis

Ichsan Panji Karunia, S.H.

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	i
SUMMARY .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori sistem hukum .....	11
2. Teori kepastian hukum .....	14
3. Teori kemanfaatan .....	16
4. Teori keadilan .....	17
F. Desain Penelitian .....	19
G. Definisi Operasional .....	20
H. Metode Penelitian .....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Lokasi Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24



5. Populasi dan Sampel .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Notaris .....	28
B. Mengenai Sanksi .....	37
C. Mengenai Honorarium .....	40
D. Mengenai Ikatan Notaris Indonesia .....	44
E. Mengenai Dewan Kehormatan Daerah .....	48
F. Mengenai Majelis Pengawas Daerah .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran umum Kota Malang .....	54
B. Penerapan Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait honorarium notaris di Kota Malang .....	56
C. Akibat bagi notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris terkait honorarium di Kota Malang .....	73
1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik .....	77
2. Proses pemberian sanksi Kode Etik terhadap notaris .....	82
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 1	Teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman	12
Gambar 2	Teori keadilan menurut Plato	17
Gambar 3	Peta wilayah kota Malang	55
Gambar 4	Proses pemanggilan terhadap notaris anggota perkumpulan yang diduga melanggar ketentuan kode etik notaris	85

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Luas kecamatan dan persentase terhadap luas kota	56
Tabel 2	Persentase ketentuan honorarium berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004	59
Tabel 3	Komposisi jumlah notaris Malang Raya	63
Tabel 4	Komposisi jumlah notaris Malang Raya yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia	66
Tabel 5	Komposisi jumlah notaris Malang Raya berdasarkan lokasi kantor	67
Tabel 6	Tarif minimal yang dikenakan oleh notaris kepada klien	72